

**DEMOKRASI, KOMUNIKASI POLITIK INDONESIA DAN GLOBALISASI
(Identifikasi dan Harapan Perencanaan Ulang)**

***DEMOCRACY, INDONESIA POLITICAL COMMUNICATION,
AND GLOBALIZATION
(Identification and The Hope To Plan Anew)***

Aa Bambang A.S.

Dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Binus Jakarta; Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung

(Naskah diterima melalui email September 2015; revisi menurut catatan redaksi 19 Oktober 2015; diperiksa mitra bestari 25 Oktober 2015; revisi menurut catatan mitra bestari Oktober 2015)

Abstract

This article aims to explore and describe the democratic political communication and democracy of Indonesia type. We hope that the country's political communicators make good planning. Therefore, this article gives an overview of the basic political communication planning. This article identifies the characteristics of Indonesian peoples from the theory of sociology and anthropology. This then scrutinized it on the basis of historical reality, which the author experienced in childhood, especially in author residence. The results show that in fact Indonesia has a distinctive political communication, based on the Indonesia democratic system: Demokrasi Gotong Royong or well known as Demokrasi Pancasila. In the world it can be regarded as a form of monistic emancipatory model. Unfortunately, democracy got eroded by two trajectories of globalization which resulted in two figures causing a history accident. Efforts of Sukarno's and Gusdur-Mega's temporarily got stuck. But it's not in uselessness. There is the light of hope that in the future time, peoples of Indonesia keep building characters. Hence, it's suggested to develop conceptually, policy, and socialization on the model of democratic Indonesia.

Keywords: democracy, political communication, globalization, communication plan.

Abstrak

Artikel ini bertujuan menelusuri dan menggambarkan komunikasi politik demokratis sekaligus demokrasi khas Indonesia. Dengan harapan ada perencanaan lebih lanjut dan matang bagi para komunikator politik negeri ini. Untuk itu, disiapkan pula gambaran dasar perencanaan komunikasi politik yang mengarah ke sana. Identifikasi dimulai dari karakteristik manusia Indonesia secara teoretis sosiologis dan antropologis, kemudian dikritisi berdasarkan realitas kesejarahan (masa lalu) di lapangan, yang penulis alami pada masa kecil, terutama di kampung halaman penulis. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki komunikasi politik yang khas, yang didasarkan pula pada sistem demokrasi Indonesia: Demokrasi Gotong Royong atau yang lebih dikenal –sebutannya (tidak substansinya)– Demokrasi Pancasila; yang didunia bisa dikatakan sebagai bentuk *Model Monistik Emansipatory*. Sayang demokrasi ini terkikis oleh dua lintasan globalisasi yang memunculkan pula dua tokoh penyebab kecelakaan sejarah. Upaya Sukarno dan GusDur-Mega untuk sementara terhambat. Memang tidaklah dia-sia. Setidaknya diharapkan masih ada anak bangsa yang mau melanjutkan *character building* yang mereka upayakan. Untuk itu disarankan pengembangan secara konsepsional, kebijakan, dan sosialisasi tentang model demokrasi Indonesia tersebut.

Kata-kata : demokrasi, komuniaksi politik, globalisasi, perencanaan komunikasi

PENDAHULUAN

Setelah dikikis dua lintasan globalisasi, demokrasi komunikasi politik khas Indonesia, jejaknya tidak S terekam lagi. Kini, Indonesia benar-benar mengadopsi demokrasi (komunikasi) liberal ala barat khas Amerika Serikat. Tidak seorangpun politikus yang merupakan komunikator politik “utama” menyadari apalagi mau menggali bahwa sesungguhnya kita mempunyai karakter demokrasi tersendiri. Dengan kata lain, tidak ada politikus kita yang jadi negarawan apalagi ideolog. Mereka lebih mementingkan dan mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan kelemahan demokrasi khas Barat tersebut sekaligus memanfaatkan rakyat banyak yang masih belum mengerti persis apa itu

demokrasi. Mereka tidak mau mendidik rakyat. Mereka lebih suka menguasainya. Komunikator yang mendikte dan memanipulasi keadaan komunikasi politik.

Berdasarkan rekam jejak sejarah, budaya, dan sosiologis bangsa Indonesia, meskipun kini—dan mungkin terbayangkan demikian zaman kerajaan—terasa keotoriteran para pemimpin dan feodalisme masyarakat kita, sesungguhnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang egaliter. Hal ini setidaknya terasa pada realitas budaya dan sosiologis masyarakat kita di pedesaan. Di sana ada budaya gotong-royong tanpa pamrih. Hilangnya gotong-royong ini, ketika muncul globalisasi dalam bentuk penjajahan fisik yang memperkuat feodalisme dan mengarahnya masyarakat ke struktur pekerja (industri). Ketika zaman Sukarno, budaya asli ini hendak dikembangkan dengan konsep *character building*-nya. Sayang, bibit yang disemai itu tidaklah mudah berkembang. Kembali, lintasan globalisasi yang berupa hegemoni memporak-porandakannya. Sukarno pun tumbang.

Fenomena dimaksud setidaknya memberikan empat indikasi pada kajian ini, yakni demokrasi khas Indonesia yang cenderung memudar, bentuk komunikasi politik yang dianut para komunikator politik Indonesia, dan dua lintasan globalisasi yang menggerus demokrasi kita, serta tawaran alternatif yang dapat dikembangkan guna memelihara demokrasi khas Indonesia.

Demokrasi khas Indonesia itu apa? Pada pembahasan bagian ini dipaparkan studi jurnal (perjalanan hidup) pengalaman pribadi, studi literatur, dan kajian sejarah berdasarkan proses perumusan ideologi dan sistem kenegaraan oleh *founding father*, dibandingkan dengan situasi kekinian berdasarkan observasi. Bagian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang demokrasi khas Indonesia yang cenderung memudar dimaksud. Namun sebelum beranjak pada pembahasan ini, dijelaskan terlebih dahulu tentang konsepsi proses politik yang netral secara ilmiah dan demokratis secara aplikasi. Dengan demikian, akan lebih terang apa yang dimaksud dengan demokrasi.

Permasalahan berikutnya, mengapa demokrasi khas Indonesia itu cenderung memudar? Tinjauan komunikasi politik yang –sadar ataupun tidak sadar– dipelihara bahkan dikembangkan oleh para komunikator politik memicu terhambatnya pengembangan demokrasi khas Indonesia ini. Prilaku komunikator politik pasca G30S semakin menenggelamkan demokrasi kita yang khas itu. Pembahasan mengenai hal ini akan dipadukan dalam bahasan dua lintasan globalisasi yang ikut mengikis demokrasi khas kita. Dengan demikian ada resultan antara sikap-prilaku komunikator politik dan dua lintasan globalisasi dalam memudahkan bahkan menghilangkan demokrasi Indonesia.

Akhirnya, permasalahan “bagaimana upaya perencanaan ulang” dalam mengembalikan demokrasi khas kita berdasarkan identitas situasi yang sudah didapat merupakan bahasan terakhir sebagai alternatif pemecahan permasalahan pada artikel ilmiah ini.

Dengan semakin memudar bahkan nyaris hilang demokrasi khas Indonesia, tentu membuat prihatin kita, baik sebagai akademisi, kaum intelektual, maupun sebagai ilmuwan, bahkan para praktisi politisi-ideolog dan ekonom-ideolog. **Signifikansi** tulisan ini adalah memberikan identifikasi dan pijakan awal dalam rangka mengembangkan kembali demokrasi khas Indonesia, yang penulis yakini bisa menjadi pijakan alternatif ideologi dunia ketimbang liberalisme dan komunisme. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kini yang mengem(bali)bangkan Nusantara sebagai Poros Maritim Dunia.

Untuk mempermudah deskripsi dalam pemaparan, pembahasan tidak per-indikasi seperti disebutkan, melainkan berpadu dengan pokok bahasan sebagai berikut: definisi dan konsepsi komunikasi politik yang netral, budaya wadah komunikasi politik Indonesia, dua lintasan globalisasi, kerangka pijakan demokrasi khas Indonesia (*Monistic- Emancipatory*), Dasar Perencanaan Komunikasi Politik Pancasila (*Monistic- Emancipatory* khas Indonesia), dan diakhiri oleh diskusi sebelum diberi kesimpulan dan saran.

PEMBAHASAN

1. Definisi dan Konsepsi Komunikasi Politik yang Netral

Demokratisasi perlu dimulai dari konsepsi bahkan keilmuan dari suatu bidang kajian. dalam hal komunikasi politik, perlu dikembangkan definisi dan konsepsi ke arah itu.

Terdapat dua karakter definisi dan konsepsi komunikasi politik yakni: *Positivis* yang bercirikan **konvergen-linear-reduktif-praktis** dan *apositivis* yang berkarakter **divergen-sirkulair-holistik-ideal**. Dalam pembahasan komunikasi politik yang netral –maksudnya tidak membedakan antara posisi komunikator (*communicator*) dan komunikasi (*communi-cate*) sebagai

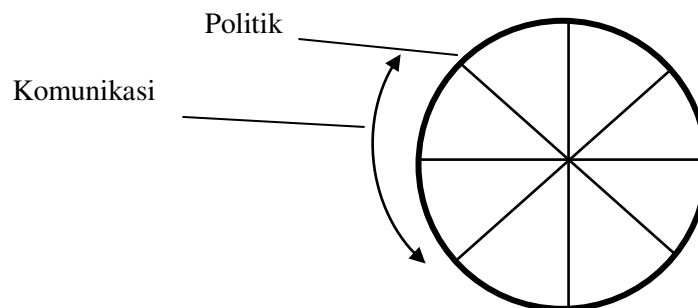
lebih atau kurang, berarti juga yang demokratis— maka definisi dan model yang dipergunakan berikut, tidak linear dan tidak terpusat.

Secara umum, komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian lambang-lambang yang bermakna dari manusia satu kepada manusia lain. Sementara politik menurut Miriam Budiardjo seraya bersandar ke Aristoteles, adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Politik merupakan pandangan kebijakan.(2010). Dengan demikian politik berkata dasar sama dengan polisi yakni *policy* yang berarti kebijakan. Sedangkan kata yang nyaris bermakna sama adalah *wisdom* yang bermakna bijaksana. Definisi ini tentu sangat tidak positif. Pembahasan tidak terfokus kepada kekuasaan, tapi kebijakan (aturan untuk kebaikan bersama) dan kebijaksanaan (perlakuan khusus dari kebijakan karena alasan situasi dan kondisi tertentu).

Berdasarkan definisi per kata tersebut, maka komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian lambang-lambang yang bermakna dari politikus kepada khlayak atau sebaliknya dengan tujuan tercipta kebijakan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan, kebajikan, dan kebahagiaan bersama. Karena ada kata “bersama” berarti komunikasi politik erat berkaitan dengan partisipasi politik, yakni keikutsertaan semua orang (baik komunikator maupun komunikan) dalam 2 hal: merumuskan kebijakan dan melaksanakan keputusan. Apabila kedua hal ini bisa dicapai berarti partisipasi politik orang tinggi. Dengan demikian diharapkan tujuan (komunikasi) politik yakni kebaikan, kebajikan dan kebahagiaan bersama akan tercapai.

Berdasarkan hal itu pula, maka komunikasi politik ditujukan dalam kerangka politik pada suatu sistem politik. Sistem politik memberikan gambaran yang kuat dalam bentuk, corak, ragam, maupun kegiatan usaha politik. Sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat pada semua masyarakat bebas, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi dengan menggunakan pendekatan kebersamaan dan partisipasi baik secara individu maupun berdasarkan bidang kehidupan guna mencapai tujuan bersama.

Pada kerangka ini, politik dianggap sebagai sesuatu yang berada di semua aspek/bidang kehidupan sehingga ada perimbangan yang wajar. Hal ini melahirkan Sistem Politik Terbagi (*desentralis*). **Komunikasi** (politik) dianggap sebagai alat untuk mengoptimalkan interaksi semua aspek/bidang kehidupan guna mencapai tujuan.



Gambar 1: Sistem Komunikasi Politik Terbagi

Perlu diingat, politik tidak lepas dari gambaran sikap-tindak manusia dalam interaksinya yang berhubungan dengan kekuasaan dan struktur kemasyarakatan. Sistem politik (sispol) selalu berusaha mempertahankan sipat *integrasi* dan *adaptasi*. *Integrasi* supaya sispol tidak pecah, berantakan. Sebuah kebijakan dalam prakteknya amat naif, bersipat mempertahankan *status-quo*. Sedangkan *adaptasi*: agar sistem politik/kebijakan diterima masyarakat. Sehingga kebijakan selalu diadaptasi terhadap struktur masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kemampuan penyerapan/penerimaan dari *output*. Maksudnya, seluruh kebijakan harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian penyerapan opini publik amat menentukan dalam sebuah negara yang demokratis. Contoh: Soeharto jatuh karena kebijakannya sudah tidak sesuai dengan opini publik dan tuntutan masyarakat yang pada gilirannya membentuk sispol baru. Dengan kata lain Soeharto jatuh karena tidak beradaptasi dengan sispol baru.

2. Budaya sebagai Wadah Politik dan Komunikasi Politik di Indonesia

Situasi politik tidak lepas dari situasi dan kondisi masyarakat tempat kegiatan politik dilangsungkan. Memang, saat ini Indonesia sudah memasuki masa reformasi dan demokratisasi. Namun, situasinya masih bisa dikatakan transisi. Perlu seorang pemimpin yang berani memberi contoh agar demokratisasi itu menuju arah yang benar dan tepat. Saat sebelum Jokowi, pemimpin Indonesia masih berpola lama: memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat demi kelangsungan kekuasaannya. Persis seperti Suharto. Lantas, sebenarnya, seperti apa situasi-kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia kini?

Sampai saat ini, situasi-kondisi sosial budaya Indonesia belum banyak berubah. Hanya berbeda dalam eporia saja, eporia kebebasan. Karena eporia, kadang kebablasan. Mental dan jiwanya belum banyak berubah. Dengan demikian, rujukan-rujukan studi budaya dan mentalitas serta struktur kuasa dan kekuasaan masih bisa berpijak pada literatur-literatur terdahulu, seperti karya Koentjaraningrat, Kluckhohn, Sukanto, dan semacamnya.

Dari sudut politik dan kekuasaan, juga tidak berubah. Bicara Politik Indonesia, berarti bicara Politik Jawa. Meskipun kelas menengahnya dipercaya sudah berubah, bahkan elit kerajaannya sudah bergaya bahkan berwatak *egalit* (seperti Sultan Yogya), namun masyarakat bawah masih bisa dieksploitir oleh “Gaya Suharto” dan elit politiknya masih menerapkan pola yang sama, bahkan dengan *aling-aling* demokrasi. Demokrasi semu, demokrasi prosedural, demokrasi kulit. Kalau Suharto tanpa *tedeng aling-aling!* (Ironis memang pada masa sebelum Jokowi: Raja/sultan sudah berwatak demokratis, presiden yang –mestinya– dipilih rakyat malah bergaya raja!)

Berdasarkan hal itu, untuk mengetahui komunikasi politik, sistem politik, dan demokrasi khas Indonesia, perlu dideskripsikan lebih dahulu dengan identitas dan sifat-sifat manusia Indonesia secara keseluruhan. Namun, karena dikatakan terjadi kesamaan antara masyarakat bawah dengan kaum elit (masyarakat kelas menengah saja yang berbeda): Masyarakat bawah masih cenderung mudah dimanipulasi oleh elit, sebaliknya elit pun cenderung memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan kekuasaannya, maka elit –Jawa atau bergaya Jawa– lah yang akan lebih disoroti. Dalam terminologi Jawa, elit ini sering disebut priyayi. Selain itu, elit ini juga sebagai representasi masyarakat kota yang relatif melek politik, maka masyarakat kota akan disoroti juga.

Bila dilihat dari segi orientasinya, Clyde Kluckhohn (1961) membagi manusia berdasarkan empat kerangka utama yaitu orientasi dalam Hakekat Hidup (HH), Hakekat Karya (HK), Hakekat Waktu (HW), Hakekat Alam (HA), dan Hakekat hubungan antar manusia (HaM). Berdasarkan kerangka Kluckhohn inilah, Koentjaraningrat (1981) menelaah manusia Indonesia. Khusus masyarakat kota, terutama manusia kota Jawa, Koentjaraningrat menggolongkannya kedalam priyayi –mungkin meminjam klasifikasi/taksonomi Clifford Gertz (1960). Menurutnya, orientasi HH masyarakat kota/priyayi menghubungkannya dengan HK : karena hidup ini baik maka karya adalah untuk amal (bukan amal pengertian Islam), yaitu kebahagiaan hidup berupa kedudukan, kekuasaan, dan lambang-lambang lahiriyah kemakmuran.

Sedangkan masalah HW, priyayi cenderung berorientasi ke masa lampau, terpujau kegemilangan masa lalu. Kemudian, priyayi memandang alam ini sebagai suatu sistem, yang mengelilingi dirinya yang ‘kecil’. Dalam hal ini membentuk karakter mereka menjadi tergantung kepada nasib. Tapi, mereka juga suka berspekulasi tentang nasib ini, yaitu dengan didirikannya *sareseyan* sebagai tempat pertemuan mereka untuk mengisi waktu senggang dengan main judi. Pandangan mereka tentang MM cenderung berorientasi ke atas. Mereka lebih memandang dengan rasa hormat orang-orang yang berada di atasnya, baik dari segi kekayaan, maupun kekuasaan atau kedudukan.

Sedangkan mengenai karakteristik *urban community* dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1982) sebagai berikut: a)Makanan dan pakaian dipakai sebagai alat pencerminan kedudukan social; b)Kehidupan keagamaan berkurang, mengarah ke sekuler (*secular trend*); c)Bersifat individualistis tapi kurang berani menghadapi kelompok di luar dirinya seorang diri. Jadi, kebebasan yang diterima tidak dapat memberikan kebebasan yang sebenarnya kepada yang bersangkutan; d)Pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas-batas nyata, ini mengakibatkan terjadinya kelompok-kelompok kecil (*small group*); kemungkinan mendapatkan pekerjaan lebih

banyak; e) Jalan pikiran yang rasional diakibatkan interaksi berdasarkan kepentingan ketimbang karena urusan pribadi; f) Pembagian waktu yang teliti karena kehidupan di kota iramanya lebih cepat; dan perubahan sosial lebih cepat dan lebih tampak, akibatnya sering terjadi pertentangan golongan tua dan yang muda akibat perbedaan kecepatan tersebut.

Lukisan di atas, baik secara budaya maupun secara sosiologis, merupakan lukisan masyarakat kota. Namun masyarakat kota, kini, masyarakat yang masih dalam keadaan transisi. Sehubungan dengan hal ini, Riggs dalam Hoogevelt (1985) melukiskan tiga karakter masyarakat yang dilukiskannya menjadi seberkas masukan cahaya yang diurai oleh sebuah prisma menjadi sinar-sinar (unsur-unsur cahaya). Seberkas cahaya itu sebagai lukisan masyarakat tradisional, sedangkan berkas cahaya yang ada di prisma melukiskan masyarakat transisi, dan cahaya keluaran dari prisma yang sudah menjadi berkas-berkas sinar (spektrum cahaya) merupakan masyarakat modern. Sedangkan masyarakat transisi yang digambarkan sebagai sinar dalam prisma adalah masyarakat yang sedang kebingungan akan nilai-nilai, padanya terjadi anomie. Menurut Ogburn dalam keadaan *anomie* ini akan menimbulkan keadaan *disequilibrium* (ketidakseimbangan antara budaya mental/spiritual dengan budaya material). Hal ini dikarenakan “budaya material” lebih mudah dan cepat diterima dibandingkan dengan “budaya immaterial”.

Sedangkan menurut E. Durkheim pada saat ini terjadi pembagian kerja yang kabur, *disorganisasi* dan *disintegrasi*, serta terjadi *profanisasi* dan *desakralisasi* (rasionalisasi). Kemudian, Talcot Parson menambahkan, selain terjadi anomie pada masyarakat transisi ini, juga terjadi *formalism* dan *polymotivation*, karena semua tidak jelas.

Selain analisis kritis di atas, penulis juga sempat melakukan observasi masyarakat kota dengan karakter seperti itu, terutama golongan priyainya. Perilaku para pejabat dan para istri-istrinya yang bukan dari Jawa pun sudah tak dapat dibedakan lagi. Pengamatan penulis yang spesifik dilakukan dalam berbagai kesempatan pada beberapa instansi; seperti Departemen Penerangan, Kantor Pemda DKI, dan PMI Cabang DKI Jaya saat penulis berkepentingan ke sana. Sebagai misal, penulis sempat terkesima saat bicara dengan seorang Kolonel laut yang berasal dari Tondano yang logat, kata-kata, aksennya persis dengan orang Solo. Demikian juga beberapa Darma Wanita dan Darma Pertiwi, banyak yang berasal dari Manado, Kalimantan, dan Padang semua perilaku dan kata, istilah, partikel, jargon, dan sebagainya persis putri Keraton Yogya, terutama pada saat mereka berhubungan dengan para atasan.

Hal lain, yang tidak kalah pentingnya, sorotan dari sudut Agama. Belajar dari kasus kampanye SARA yang ditujukan ke pasangan Jokowi-Ahok pada saat kampanye gubernur DKI – meskipun Foke-Nara kalah–bahkan sampai pileg yang baru lalu; maka dalam komunikasi politik yang demokratis pun masalah SARA ini harus diperhatikan. Untuk pelukisan agama masyarakat kota dan priyayi, penulis gunakan hasil penelitian Clifford Greetz (terj.,1981) tentang kehidupan beragama kaum priyayi.

Para priyayi, memandang agama dari tiga titik pandang sebagai titik utama kehidupan: etiket, seni, dan praktek mistik. Pada etiket ada empat prinsip pokok; bentuk yang sesuai dengan pangkat yang tepat, ketidaklangsungan, dan kepura-puraan. Mengenai seni, mereka sangat menggemari wayang, gamelan, tembang, dan sebagainya. Dalam hal ini, dapat digunakan sebagai media tradisional dalam perencanaan. Sedangkan dimensi mistik, priyayi memandang semua agama sama, oleh karenanya tidak heran bila kita dapatkan dalam suatu keluarga terdapat bermacam pemeluk agama. Ini banyak terjadi di kota Solo. Puncak tertinggi mistik adalah mencapai Ilmu Sejati, yang bisa menyatukan diri dengan Tuhan : Gusti adalah Kula, Kula adalah Gusti (manunggaling kula lan Gusti). Untuk mencapainya dengan cara meditasi yang menghasilkan rasa tertinggi. Dua tahap utama dalam pencapaian itu yaitu dengan *neng* (hening = diam) menenangkan/mengendalikan emosi dan *neng* tahap kedua yaitu mengosongkan batin sama sekali. Menurut orang Muhammadiyah (Geertz, 1981:424) mereka inilah yang mengaku Islam tapi tidak menjalankan syari’at Islam, tidak mengikuti ajaran Al-Qur’an tapi lebih mengikuti gagasannya sendiri. Mereka itulah yang disebut ‘Islam Kejawen’. Barangkali, karena pola *neng* yang sama, bisa dikatakan Islam kejawen ini sekarang berkembang menjadi apa yang dinamakan *aliran kepercayaan*. Demikianlah agama kaum priyayi, yang juga ditiru oleh kaum abangan. SBY dalam hal ini priyayi sekali.

3. Dua Lintasan Globalisasi

Globalisasi, suatu keniscayaan sebagai akibat berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, teknologi transportasi, dan perdagangan dunia (yang terakhir juga diakselerasi oleh yang pertama dan kedua). Namun, dalam globalisasi itu, sering terselip kepentingan dunia yang tidak seimbang: kepentingan Barat yang lebih menonjol. Lebih khusus lagi negara adidaya yang memanfaatkan globalisasi untuk hegemoni dan “penjajahan”. Inilah yang sering dinamakan dengan globalisme (globalisasi dalam tanda kutip) yakni globalisasi yang ditunggangi kepentingan. Indonesia pun tak lepas dari globalisme ini. Kalau dulu globalisme secara fisik, dengan menjajah, sekarang globalisme budaya dengan hegemoni.

Telah disebutkan bahwa budaya politik terbentuk berdasarkan “budaya lama” dan feodal (budaya priyayi, budaya kerajaan) sebagai akibat tradisi kerajaan tempo *doeloe* yang diperkuat dan dilanjutkan oleh kolonial Belanda. Namun, seperti telah dipaparkan bahwa ada lintasan globalisme, maka perlu pula dideskripsikan situasi “Indonesia Kini” yang tidak hanya dikusai oleh budaya feodal tersebut, melainkan juga budaya politik yang terbentuk akibat lintasan demokrasi liberal barat yang disemai oleh AS melalui Suharto dkk, yang dilanjutkan SBY dkk.

Dalam dua lintasan itu arus budaya Indonesia yang menjadi wadah budaya politik kita, ada budaya masyarakat banyak yang merupakan sisi lain dari adanya budaya feodal yang diciptakan oleh para ningrat dan para raja tadi. Budaya ini *real* tumbuh dan terpelihara di hampir seluruh lingkungan masyarakat “awam” (Bung Karno menyebutnya Kaum Marhaenis, Ibrahim Sutan Malaka menyebutnya Kaum Murba) Indonesia. Inilah budaya yang disebut dengan “budaya lokal” Indonesia, yang penuh dengan kebersamaan, kebijaksanaan dan kearifan lokal.

Lintasan Feodalisme-Otokrasi. Budaya ini tumbuh pada rentang waktu munculnya kerajaan di Nusantara. Pada masa ini orang kalau mau *survival* hanya mempunyai dua pilihan: taat tanpa reserve kepada raja atau berperang melawan para bangsawan dan raja tersebut, yang pada gilirannya, orang tersebut akan menjadi Raja pula, menjalankan pola kekuasaan yang dibencinya sebelum jadi raja. Ada dua hal bisa menyebabkan hal tersebut dilanjutkan: 1) dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan 2) seandainya pun ada keinginan untuk merubah, niscaya malah mendapat tentangan dari kaum istana, sehingga menggoyahkan kedudukan; maka timbul malas untuk melakukan hal tersebut. Sebagai misal, Ken Arok tidak tumbuh di lingkungan budaya Istana, setelah berkuasa di Singosari, diapun berperilaku sama dengan Tunggul Ametung. Bahkan, dia menjadi jalan atau tongkat estapet bunuh-membunuh di keluarga kerajaan: Dia bunuh Tunggul Ametung yang berjasa menariknya ke istana dari lingkaran preman (*freeman*) pesisir Jawa, dia pelihara anaknya Anusapati. Setelah sang anak besar, dia pun dibunuh anak tirinya tersebut. Terus... sampai Tohjaya dst.

Budaya tusuk-menusuk ala feodal pun diteruskan oleh para elit Indonesia (Nusantara) Merdeka. Coba perhatikan: Sukarno, sang Proklamator yang pernah berkali-kali menyelamatkan Suharto—dari akibat keterlibatan PKI Madiun, dari akibat penyelundupan gula-kopi ke Malaysia ketika jadi Pangdam Diponegoro dll—ditusuk dari belakang dengan disain G30S/PKI. Sukarno yang ingin mengembangkan budaya egalit secara pelan-pelan (dengan membiarkan sumber daya alam paling tidak 75% *virgin*, agar nanti pada saatnya dikelola oleh generasi penerus yang sudah siap berdemokrasi) ditumbangkan Suharto dengan bantuan kapitalis-liberalis. Budaya feodal pun dimunculkan kembali, bahkan dia bersikap-tindak seakan Raja Jawa. Budaya feodal-komunis, dia terapkan di bidang politik (perhatikan tiga pilar komunis: taifan/konglomerat, partai tunggal/Golkar, dan angkatan bersenjata/ABRI!). Sedangkan budaya liberal dia terapkan di bidang ekonomi. Karuan saja, hal ini menyebabkan semakin senjangnya antara kaum “awam” (orang kebanyakan) tadi dengan kaum *priyayi*: Mau eksis lewat partai, suka tidak suka harus ikut arus, tak bisa membawa idealis murni. Mau meniti ekonomi, terlindas oleh kekuatan raksasa kapitalis, tak sanggup karena tak punya modal. Rakyat kecil tak mampu “merangsek naik” melalui dua jalur tersebut tanpa harus mengorbankan idealisme. Suharto pun, guna melanggengkan kekuasaannya, “menyogok” Paman Sam dengan “Freefort, Busang, Exxon dll”. Sementara itu “kerajaannya” semakin menggurita. Bahkan sampai “calon” makamnya pun dibangun secara mewah: “Istana”(astana) Giri Bagun di Solo.

Lintasan Kapitalis-Liberal. Budaya ini sebenarnya melintas pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dengan VOC-nya. Namun, karena bobot feodalnya lebih kentara, dan VOC sendiri

bagian dari pemerintahan itu sendiri, maka pada masa ini warna kapitalis-liberal tidak terlalu menonjol.

Pada masa pemerintahannya, meskipun terkesan otoriter, Sukarno berkeinginan menciptakan NKRI yang swakelola, yang tidak memihak—apalagi diwarnai oleh— blok barat maupun blok timur. Pancasila merupakan filosofis dan sebenarnya juga bentuk sistem pemerintahan yang ingin dibangun. Di sini, pada masa ini, Pancasila tidak pernah dikaitkan dengan istilah demokrasi. Karena memang, sistem politik Pancasila bukan pengejawantahan budaya demokrasi barat (baik *city democracy*, maupun demokrasi modern) apalagi otoritarianisme atau pun komunisme Soviet. Pada masa Suhartolah Pancasila diembel-embeli dengan demokrasi: Demokrasi Pancasila. Diciptakanlah tafsir tunggal Pancasila. Dengan 36 butir-nya, Pancasila lebih digunakan sebagai instrumen ideologis kekuasaan feodal-hegemonis Suharto, daripada sebagai *grund norm* bangsa yang mengayomi semua.

Lintasan kental budaya kapitalis-liberal—yang kelak mewarnai bahkan mewataki sistem pemerintahan Indonesia—adalah pada masa naiknya Suharto dan turunnya Sukarno. Namun, liberalisme ini hanya diberlakukan di bidang ekonomi. Hal ini terlihat dengan dibuka seluas-luasnya oleh Suharto kesempatan pemodal asing untuk menggarap sumber daya alam Indonesia, yang pada masa Sukarno sangat selektif dan terbatas. Perusahaan transnasional merebak di mana-mana. Sementara, politiknya tetap feodal-otoriterian-komunis. Keadaan seperti ini oleh Paman Sam sang *backbone* dan arsitek kekuasaan Suharto, dibiarkan saja. Karena memang tujuan mereka bukan demokratisasi dunia, tapi lebih kepada penguasaan dunia dan kepentingan ekonomi. Bukankah Suharto telah memberikan kompensasi yang luarbiasa kepada AS dengan dibiarkannya kekayaan alam Indonesia dikeruk bahkan bijih mentah mas-tembaga Papua dikapalkan langsung ke Amerika.

Indikasi lain dari menguatnya kapitalis-liberalis Suharto adalah dengan dikirimnya para pelajar/mahasiswa Indonesia ke Amerika. Kiblat akademik yang tadinya ke Eropa, kini ke Amerika. Ilmu Komunikasi pun yang tadinya bermazhab ke *Frankfurter Skule* menjadi bermazhab *Chicago School*, dari *Publizistik* ke *Masscommunication*. Dalam bidang ekonomi, muncullah arsitek-arsitek ekonomi kapitalis-liberal, yang dikenal dengan klik Harvard. Semakin lengkaplah warna kapitalis-liberal dalam bidang ekonomi di bumi pertiwi ini.

Celaknya sistem campuran¹ yang tidak jelas ini dilanjutkan oleh Yudoyono. Tentu saja negara-negara blok Barat akan mengapresiasi ini, karena kepentingannya terjaga. Berbagai penghargaan pun diterima Yudoyono. Di satu sisi dia melestarikan gaya “kerajaan” ala Suharto, di sisi lain dia pun melestarikan hegemoni Barat (AS) di bumi pertiwi ini. Tak pelak berbagai gelar dan penghargaan pun dia terima. Yang paling bergengsi, yang biasanya hanya diberikan kepada warganegaranya yang amat berjasa, Inggris menganugrahi SBY dengan gelar “Kesatria Salib”. Luarbiasa ! Jasa apa sebenarnya yang pernah dia berikan?

Sangat disayangkan, lintasan presiden-presiden humanis tumbang dengan bantuan barat. Sukarno tumbang oleh Suharto dengan disain dan skenario G30S/PKI. Mega yang terbanyak mendapat mandat rakyat dan Gus Dur, tumbang oleh sekenario Amin Rais dengan poros tengah dan mosi tidak percaya DPR yang menyebabkan dikeluarkannya maklumat. Menurut, seorang pengacara senior yang dekat dengan Gus Dur, Gus Dur bukan tidak tahu bahwa “maklumatnya” tidak akan mempan. Dia justru ingin memberi pelajaran kepada rakyat Indonesia bahwa kalau DPR sudah memposisikan diri sebagai *input*, bukan bersama-sama pemerintah sebagai *output* dalam sistem komunikasi politik, maka yang terjadi adalah konflik. Konon, dengan maklumat itu pula, Gus Dur ingin memberi paparan yang seimbang dan biar rakyat Indonesia (baca: Sejarah) yang menilai. Buktinya, karir politik Amin Rais, habis (Mengajak Yudoyono menjadi wakilnya saja dalam pencalonan Pilpres 2009 ditolak dan, mendapat suara paling sedikit dan sangat tidak

¹ Dalam *Fisika Liquid*, “campuran” adalah persatuan dua cairan yang tidak padu sehingga kegunaannya kurang. Identitas masing-masing zat masih terlihat, contoh: air dengan minyak. Supaya jadi padu diperlukan katalisator. Sedangkan campurandua zat yang sudah padu dinamakan “**larutan**” yang kegunaannya terasa, contoh: air dengan teh dan gula (teh manis!). Demikianlah juga dengan sistem (komunikasi) politik!

signifikan). Sedangkan Gus Dur tetap dipuja sebagai Bapak Bangsa dengan pembuktian di akhir hayatnya. Megawati pun masih bisa berkiper di dunia politik tingkat tinggi (*high politic*).

“Demokrasi” asli Indonesia. Apabila kita mau bijak dan berendah hati untuk belajar pada kearifan lokal, dengan sedikit mengurangi Barat sentris, maka kita akan ketemu pola bernegara yang alami di lokal kita. Zaman dulu, di Kampung Bayur, Desa Lemah duhur, Karawang –kampung halaman saya– ketika seseorang mau membangun sebuah rumah, tanpa diundang, apalagi diminta bantuan, tetangga pada datang. Ada yang menyumbang tenaga, ada yang menyumbang bambu, ada yang menyumbang batu bata dan lain sebagainya. Si Empunya Hajat, hanya menyediakan *bubur beas* yang disiram *gula ganting* (cairan agak kental gula merah yang direbus). Para tetangga dengan senang hati melahapnya sebagai sarapan pagi. Makan siang hanya nasi dan sambel lalapan plus ikan teri (asin), kalau yang agak mampu ditambah sayur asem, mantaplah semua. Tidak perlu mengeluarkan bayaran.

Model kebersamaan seperti itulah yang mendasari Pancasila. Itulah yang oleh Bung Karno disebut “Gotong Royong”. Gotong royong sejenis “sistem politik” yang didasarkan pada kerelaan. “Komunikasi politiknya” pun sedemikian efektif, sehingga si “politikus” utama sebagai komunikator politik (pembangun rumah) tidak perlu mengeluarkan permintaan, apalagi permintaan keras atau intimidasi. Dia hanya mengungkapkan niatnya. Padahal itu kepentingannya. Tapi, mengapa “kepentingannya” itu justru *diturut* oleh orang lain? Padahal tidak ada tawaran menggiurkan bahwa “kalau terpilih” (rumah sudah terbangun) para “pendukung” akan dapat ini-itu. Mungkin saja, kita bisa bilang, mereka mengharap juga nanti dibalas ketika membangun rumah juga. Tapi, apa dijamin bahwa setiap “pendukung” (yang membantu) itu akan menjadi “calon pemimpin” (membangun rumah) juga? Belum tentu! Mereka ada yang pindah kampung halaman. Ada yang meninggal. Lagipula, tidak terbentur “traksaksional” semacam itu di benak mereka. “*Euweuh, teu kapikir kadinya. Nu penting mah guyub!* (Tidak ada. Tidak terpikir ke sana. Yang terpenting kebersamaan)” ujar seorang renta di Kampung Bayur. Mereka lebih menitikberatkan pada hal kebaikan bersama. Mereka lebih menginginkan *guyub* demi kerharmonisan. Di situ terbangun ketulusan. Ketulusan “komunikate politik” dan kerendahatian “komunikator politik”. Itu adalah koreksi pada sistem kerajaan yang feodal. Tetapi, itu pula yang memfilter kebebasan tanpa batas. Filter ketulusan, kerelaan, pengorbanan, dan kebersamaan! Yang jadi masalah adalah: mengapa hal tersebut tidak terjadi sekarang? Atau dengan pertanyaan lain: mengapa hal tersebut tidak terwarisi generasi kini?

Penjajahan rupanya tidak hanya menyebabkan kehancuran sendi-sendi material, melainkan juga sendi-sendi mental bahkan spiritual. Kita boleh jadi menentang bentuk penjajahan dengan segala manifestasinya, akan tetapi bersamaan dengan itu, kitapun mengadopsi gaya feodal para penjajah. Lihat Soeharto, lihat pula Yudoyono yang juga bergaya seperti Raja Jawa Baru. Seandainya kepemimpinan Sukarno tidak dijegal Suharto dengan agenda G30/S-nya, maka diyakini Indonesia akan selamat. Bukan hanya dari segi material–*virginnya* sumberdaya alam (minimal 70%, yang memang diperuntukan Sukarno diolah oleh bangsa sendiri)– melainkan juga terpeliharanya mental-moral-jiwa dan budaya serta spiritualitas bangsa Indonesia. Peralihan kepemimpinan dari Sukarno ke Suharto–lah dengan dalih G30S/PKI yang menyebabkan sendi-sendi “*komunikasi politik gotong royong*” hilang. Bagi kita, itulah sumber kekacauan bangsa Indonesia dari semua tatanan. Terlepas dari AS dengan CIA-nya yang mengendap-endap sejak lama. Zaman Surat olah Freeport, Caltec, Exxon, Busang tercipta. Penghisapan manusia feodal dengan gaya barunya bersimaharajela. Sebagaimana Suharto menamakan periode pemerintahannya dengan ORDE BARU. Dan, dengan sinisnya menjuluki masa pemerintahan Sukarno sebagai ORDE LAMA. Bagi kita itulah titik balik revolusi. Bagi kita itulah KECELAKAAN SEJARAH. Disemailah keliberalan–bahkan lebih liberal dari–Paman Sam di dalam kefeodalan dan keotoriteran Soeharto. Meledaklah “sebuah panen” kebebasan ala “si Sam” itu di penghujung ‘kerajaan’ Suharto. Hasilnya: reformasi terjadi tapi penuh euforia demokrasi yang semu, yang muncul justru neoliberalisme dan neokapitalisme ekonomi, dengan substansi demokrasi yang minim. Gusdur-Mega tak mampu menyelamatkan hal ini. Karena–seperti tahun 66 “militer” dibantu intelektual (yang kemudian menjadi pembawa klik Harvard)– “Sang Militer” kembali “dibantu” “Sang Intelek” lain meruntuhkan budaya komunikasi politik asli yang sedang dibangun oleh Gusdur tersebut.

Muncullah Yudoyono sebagai manifestasi Suharto baru. Dia lanjutkan kebiasaan Suharto: pengelolaan ekonomi yang liberalis bahkan neoliberalis, pengelolaan politik yang komunistik, komunikasi politik yang propagandistik: teknik *black out*, *cover up*, *glittering generalities*, teknik *labeling*, *name calling device* dan sebagainya. Kalau Suharto terkenal dengan tuduhan Anasir G30S/PKI, OTB, ekstrim kiri-ekstrim kanan; Yudoyono terkenal dengan tuduhan ke lawan politiknya: menghayal, berkhulusinasi, kebohongan yang berulang-ulang. Itulah jargon-jargon untuk melemahkan lawan politik. Maka, bagi kita, kalau Suharto merupakan kecelakan (sejarah) revolusi; Yudoyono merupakan kecelakaan (sejarah) Reformasi.

4. Kerangka Pijakan Konsepsi Demokrasi Khas Indonesia

Seandainya pola komunikasi politik asli bangsa Indonesia itu berkembang, tidak terjadi “kecelakaan sejarah” seperti disebutkan di atas, maka akan muncul sistem (komunikasi) politik baru (di dunia) yang original ala Indonesia! Sistem ini tidak hanya berdasarkan kesetaraan hubungan antara komunikator politik dengan komunike politik dalam bernegara, melainkan juga adanya kontrol tulus hatinurani yang *nyantol* secara vertikal kepada Tuhan Pencipta segala! Inilah “Demokrasi Pancasila” yang sesungguhnya, yang menempatkan Ketuhanan pada Sila Pertama! Inilah “Demokrasi Gotong Royong” dimaksud Bung Karno yang contohnya ternyata terjadi juga di kampung halaman penulis!

Model Monistic-Emancipatory. Model ini merupakan model alternatif bagi dua arus utama yang ada di dunia, model liberalis-kapitalis dan model sosialis-komunis. Sedangkan model-model lainnya seperti Naziisme dan sosial demokratis, hanya varian saja dari dua model arus utama. Model ini secara praktis sudah ada sejak pemunculan Islam dan dibuktikan pada Zaman pemerintahan Muhammad dan para khalifahnya. Namun, secara model yang diakui, baru 1950-an dan mulai menghangat akhir abad XX. Kini, model ini menduduki posisi sentral, karena model ini menjadi ajang bertemunya para penganut model pertama dan kedua yang merasakan kelemahan mendasar dari model yang mereka anut itu. Pencarian model apa yang akan memenuhi tujuan hidup manusia –kebahagian dan kemerdekaan– akan berujung pada dianutnya model ketiga, sebagai alternatif yang ada sementara model alternatif lain belum ditemukan: mungkin tidak akan ditemukan kecuali variasi dari model ketiga saja! Demikian Mowlana dan Wilson (1990).

Karena *Monistic-Emancipatory Model* ini yang menjadi acuan –sebab sangat konkrue dengan pendekatan religius, yang cocok bagi Bangsa Indonesia– maka pembahasan berikut berfokus pada model ini.

Makna monistic-emancipatory bisa dipaparkan secara deskriptif sebagai berikut (Mowlana dan Wilson, 1990). Model ini muncul berdasarkan *humanistic revolutioner*, bersandar pada pertumbuhan spiritual yang menekankan kualitas, dan berpijak kepada persamaan dan keseimbangan dalam sistem internasional. Para penulis model ini mendukung keutuhan dan kebulatan pribadi yang mempunyai akar lebih manusiawi, etis, tradisional, dan percaya pada diri sendiri dalam membangun. Walaupun model ini bersifat universal namun akan sangat adaptif dalam setting sosial dan kultur yang berbeda-beda, dalam bentuknya yang lebih operasional. Jadi, pembangunan kemanusiaan secara universal berdasarkan kesadaran pembangunan individu. Hal ini, sebagaimana dikemukakan Collum berdasarkan penjelasan Sir Oliver Lodge ketika awal munculnya model ini pada permulaan peradaban Mesopotamia :

“Monism” should apply to any philosophic system which assumes and attempts to formulate the essential simplicity and “oneness” of all the apparent diversity of sensual impression and consciousness, any system which seeks to exhibit all the complexities of existence, both material and mental –the whole of phenomena, both objective and subjective –as modes manifestation of one fundamental reality (Mowlana and Wilson 1990,71).

Secara bebas dapat diterjemahkan sebagai berikut: Monisme dapat diterapkan pada beberapa sistem filosofis yang asumsinya adalah untuk memformulasikan kesederhanaan dan keutuhan individu dari seluruh perbedaan, yang selaras serta penuh impresi dan kesadaran. Dia merupakan sistem yang mencoba memaparkan seluruh eksistensi yang kompleks di antara material dan mental, keseluruhan fenomena yang obyektif dan subjektif. Inilah caramanifestasi realitas yang fundamental.

Denis Goulet (1970), pelopor model ini, mengkritik model pembangunan kaum elit yang tidak seimbang dan penuh diskriminasi, sebagai hasil model liberal yang penuh penindasan.

Menurutnya, kesuksesan pembangunan bukanlah kuantitas belaka. Para pelopor model ini tidak memandang ekonomi dan pembangunan politik sebagai tujuan terpenting pembangunan, melainkan kepentingan individu, kebudayaan, serta sosial dan pengembangan individu.

Ditinjau dari komunikasi politik dan pembangunan, Model Monistic-emancipatory ini lebih menekankan dialog, komunikasi dua arah. Salurannya, selain teknologi modern juga menekankan saluran komunikasi tradisional. Komunikasi interpersonal juga dianggap berperan dalam dialog masyarakat dengan komunikator politik dan para perencana pembangunan. Tekanan dialog ini pun, tidak hanya antar orang, melainkan dialog dengan diri sendiri dengan penuh kritik dan introspeksi, wanita maupun pria. Komunikasi dua arah ini dianggap kebutuhan yang eksistensial dalam pembangunan. Fokus utama dialog komunikasi pembangunan ini lebih kepada masyarakat manusia ketimbang *nation state*, ke universal-monistik daripada kebangsaan, kepada agama daripada hubungan sekuler manusia, emansipasi (dalam arti pendudukan hak secara proporsional atau “ikhlas” sesuai dengan ajaran agama, pen.) ketimbang dominasi dan *alienasi*. Dan, yang perlu ditekankan di sini, makna pengembangan individu tidak sebagaimana liberalisme dengan prinsip *the survival fittest*-nya, melainkan individu sebagai manusia yang penuh kemanusiaan, manusia yang bertanggung jawab pada Penciptanya.

Negara, menurut model ini, berfungsi menyokong dan melayani kepentingan individu dalam posisinya sebagai makhluk manusia di dunia ini dan makhluk yang bebas dari segala perbudakan menuju martabat yang paling tinggi. Karenanya segala bentuk paksaan dari negara tidak dibenarkan. Penguasa yang bertindak sewenang-wenang dengan dalih demi kepentingan bersama atau demi stabilitas dan persatuan & kesatuan –kalaupun memang demikian adanya– dianggap penganut Fir’aunisme. Apalagi dalih itu dibuat-buat, sekedar untuk menutupi kelemahan guna mempertahankan *status quo*; amat sangat tidak dibenarkan sehingga tercela dilihat dari model ini.

Para penguasa seperti itu sering merasa benar sendiri, mereka tidak menyadari dirinya manusia juga yang mempunyai keterbatasan. Padahal dengan ketidaksadarannya itu yang mengakibatkan manusia lain dianggap seperti binatang; menyebabkan diri mereka hina dan rendah sebagai manusia tanpa akal-fikiran (tak berbudi). Kesombongan Fir’aun sebagai manusia anutan mereka –sadar atau tidak– telah diabadikan dalam kitab suci: “Aku tidak mengemukakan kepada kalian selain yang kupandang baik, dan aku tidak menunjukkan kepada kalian selain yang benar!” (QS.40:29). Padahal, kata-kata seperti itu dalam model komunikasi politik dan pembangunan *emancipatory* hanyalah Allah yang berhaq.

Dalam model komunikasi politik dan pembangunan *emancipatory*, dengan demikian, tidak lagi ada masalah dilema prioritas seperti pada model liberal dan model sosialis : mana yang harus didahulukan individu atau masyarakat? Dalam mencapai kesejahteraan mana yang harus diutamakan *Gross National Product (GNP)* atau *Physical Quality of Life Index (PQLI)*. Walaupun di antara mereka ada yang menjawabnya kedua-duanya memegang peranan penting (Jayaweera *et al.*, 1987), namun kesejahteraan belum tercapai juga. Para pelopor Model Komunikasi dan Pembangunan *Emancipatory* ini adalah negara-negara Islam dan beberapa negara berkembang non-Islam. (Tapi, tidak menjadi jaminan negara yang mengaku negara Islam atau negaramayoritas Islam menganut model ini; Quait, misalnya, tidak menganut model ini).

Tokoh-tokoh model ini cukup banyak, baik di negara “maju” maupun negara “berkembang” seperti: Ali Syariati, Abul Ala-Madudi, Muthahari, Paolo Freire, Denies Goulet, Collum, Sir Oliver Lodge, dan sebagainya.

5. Dasar Perencanaan Komunikasi Politik Pancasila (*Monistic - Emancipatory* khas Indonesia)

Bung Karno –bisa dikatakan– mengistilahkan komunikasi politik, sistem politik, bahkan ideologi negara dan Bangsa Indonesia sebagai “Gotong Royong” yang merupakan perasan dan pemampatan (*zip*) dari ekasila yang berasal dari Pancasila. Dengan demikian, demokrasi khas Indonesia adalah “gotong-royong” dengan dasar utama Ketuhanan yang ditopang kemanusiaan. Dengan kata lain, sistem Pancasila! Bolehlah kalau mau diembeli demokrasi menjadi “Demokrasi Pancasila” (tapi bukan demokrasi Pancasila ala Suharto). Pancasila inilah –dapatlah dikatakan– sebagai salah satu bentuk konkrit dari model *Monistic Emancipatory*.

Dalam perencanaan komunikasi politik atau pun komunikasi pembangunan, pada Model *Monistic Emancipatory* selalu menyandarkan diri pada Ketuhanan dan dengan demikian berperspektif agama. Apakah memang komunikasi politik perlu direncanakan? Apa alasannya?

Lalu bagaimana dengan Komunikasi Politik Pancasila, bagaimana perencanaannya? Apa sebenarnya perencanaan itu?

Secara sadar atau tidak setiap orang berbuat sesuatu menggunakan perencanaan, baik tertulis maupun tak tertulis. Petani, misalnya, dia mencatat kegiatan “memproduksi padi” dari menyemai sampai tanggal memanen dalam buku “bon”-nya yang telah lapuk; tidak sadar bahwa dia melakukan perencanaan. Saya, sebagai staf pengajar, mau mengajar Perencanaan dan Komunikasi melakukan abstraksi-abstraksi dan konsepsi-konsepsi di dalam pikiran saya, walaupun tidak tertulis, tapi saya sadar betul bahwa itu perencanaan.

Sementara itu, Middleton (1978, 2) mendefinisikan perencanaan sebagai: “*the application of theory to reality in order to decide what to do, when and how*” dan “*an expression of the elemental scientific statement : if...then..., If these actions are carried out, then certain desirable consequences will occur*” (1980, 19). Friedmann (1973, 19) mendefinisikan perencanaan sebagai “*application of scientific and technical intelligence to organized activities*”. Menurut Prof. Bintoro (1979), perencanaan dalam arti luas merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari uraian dan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses perumusan tujuan dan proses mengorganisir/ mempersiapkan suatu aktivitas kegiatan untuk mencapainya secara sistematis : apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana; dengan berdasarkan kepada pemikiran ilmiah (jika begini maka begitu). Jadi, dengan perencanaan : tujuan terumus secara sederhana, kerennya masalah yang rumit menjadi jelas; langkah-langkah yang ditempuh lebih nyata dan sistematis, karenanya perencanaan sebagai panduan dalam mencapai tujuan; dan karena berlandaskan pemikiran ilmiah maka perencanaan bisa meramalkan (*prediction*, bukan *forcasting*) hasil dan resikonya, karenanya bisa menjawab keterbatasan sumberdaya (uang, orang, material, dan semacamnya).

Berkaitan dengan pengembangan komunikasi politik “demokrasi asli Indonesia” yakni Pancasila atau bolehlah penulis namakan “Demokrasi Gotong Royong Ilahiyah-humanistik” maka perlu perencanaan yang matang dan mantap. Tujuan komunikasi diperjelas, misal supaya mendukung program sosialisasi pengembangan komunikasi politik dimaksud, terutama kaum menengahnya, yang memang dari segi karakteristik dan akseptabilitas tidak terlalu jauh dari harapan. Usaha ini dikonkritkan dengan langkah-langkah penyampaian pesan, waktu penyampaian, tingkat kekuatan pesan yang diperlukan dengan mempertimbangkan faktor penghambat-penunjang.

Karena perencanaan ini bersifat profesional, dalam artian berdasarkan pertimbangan ilmiah, maka *data base* sebagai bahan utama pengambilan keputusan dalam perencanaan, selain berdasarkan fakta empirik (data aktual), juga harus selalu bersandar pada teori-teori ilmiah. Bukankah teori ilmiah itu merupakan hasil kajian yang penuh ketelitian dari data empirik juga? Bahkan, teori ilmiah mempunyai kelebihan dalam ke-universalan-nya dibanding data aktual empirik.

Dari segi identifikasi permasalahan perencanaan komunikasi, permasalahan di atas dapat dilihat berdasarkan proses komunikasi yang berjalan antara komunikator politik dengan komunikatonya, antara politikus dengan konstituennya, antar pemerintah dengan masyarakatnya secara aktual. Berdasarkan studi pustaka dan pengamatan sekilas penulis (yang penulis jadikan *data base* untuk komentar) ternyata secara umum, proses komunikasi politik mengikuti pola satu arah, bermodel stimulus-respons, pendekatan kekuasaan dan paksaan (koersif), dan dengan teknik propaganda. Bahkan pada masa reformasi ini, meskipun kini dialing-alingi dengan istilah demokrasi! Dengan demikian, permasalahan dari segi komunikasi politik menjadi jelas: *masalah komunikasi politik yang tidak demokratis; dalam arti dialogis, tidak berdasarkan atas pengertian bersama, dan tidak bersipat persuasif.*

Berdasarkan halitu, maka bisalah dirumuskan masalah (perencanaan kebijakan) sebagai berikut : Bagaimanakah agarmasyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah menerima dan berpartisipasi dalam pengembangan komunikasi politik demokratis asli Indonesia, *demokrasi gotong-royong*, yang dalam tingkat dunia disebut *Monistic-Emancipatory*.

Setiap perencanaan selalu mempunyai tujuan, dan biasanya tertuang dalam bentuk jangka waktu, maka dari permasalahan empiris tersebut, penulis rumuskan tujuan jangka pendek

dan jangka panjang. Dari dua tujuan yang berjenjang inilah diharapkan perencanaan lebih efektif dan efisien. Efektif langsung mencapai sasaran, efisien tidak boros biaya. Tujuan jangka pendek dalam perencanaan ini adalah agar komunikasi politik demokratis khas Indonesia berkembang pada masyarakat kelas menengah. Tujuan jangka panjang agar masyarakat Indonesia menerima komunikasi politik yang menguntungkan bersama ini.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penentuan sasaran (objective), tujuan (*goal*), dan target (titik sasaran). Juga, media yang dipergunakan, program apa saja, analisis SWOT dan faktor penunjang dan pendukung, serta perencanaan sosialisasi tambahan.

Itulah dasar perencanaan pengembangan komunikasi politik yang demokratis khas Indonesia, yang bisa dilanjutkan oleh para pemegang kebijakan, yang bisa dituangkan dengan “perencanaan komunikasi politik dan pembangunan” lebih lanjut dan lebih konkret.

6. Diskusi

Sebenarnya ada harapan baru dengan munculnya tokoh-tokoh egaliter, seperti Sri Sultan (meskipun sejatinya dia seorang raja), Jokowi, Ahok, Ganjar Pranowo, Triskusumarini dan banyak kepala daerah lainnya. Mereka adalah tokoh yang tidak menyembunyikan jadi diri dengan “ke-jaim-an” agar terlihat berwibawa dan berjarak dengan masyarakat karenanya. Bahkan, mereka oleh beberapa stasiun televisi dianggap bergaya “koboy”. Tokoh-tokoh seperti ini bisalah diharapkan sebagai lokomotif untuk mengemban perencanaan “proyek megamental” tersebut sekaligus melaksanakannya secara lembut dan bertahap.

Permasalahannya adalah: seringkali lawan politik yang sudah kedodoran dan terlanjur bersekutu dengan dan membela “yang bayar” melakukan *negative campagne* kepada mereka dengan “materi SARA” termasuk di dalamnya muslihat *name calling*. Kurang sedapnya, masyarakat banyak –bahkan yang berpendidikan sekalipun– termakan oleh *rumours* yang mereka sebar. Di sisi lain, partai pengusung tokoh-tokoh koboy itu tidak melakukan *counter campagne* yang memadai, minimal memberi penjelasan. Akibatnya, misal, PDI perjuangan pada Pileg kemarin merosot elektabilitasnya dibanding survey-survey sebelumnya. Menurut beberapa survey, banyak konstituennya yang “melarikan diri” pada sebulan, seminggu, bahkan sehari sebelum pemilihan. Tentu saja cara kampanye partai politik seperti itu tidak berakhlak. Tapi, tidaklah mudah mengubah tabiat orang yang dengan sadar dan sengaja berbuat seperti itu. Bagaimana pemecahan permasalahan harus dimulai dari pihak pendukung “tokoh koboy” itu. Ataukah, memang begitulah sikap orang yang dalam posisi benar, tidak mengkonter tuduhan, sebab kalau mengkonter akan timbul petenggaran. Mereka, misal para tokoh PDIP, selalu bilang bahwa mereka yang memfitnah akan tergelincir dengan sendirinya? Bisakah diterima dalam politik rasional kepercayaan seperti itu? Kalau bisa, kapan titik berhenti kritik itu karena terbuktikan tergelincir? Bukankah pada Pileg hasutan dan fitnahan itu cukup efektif?

Dalam dinamika politik masa kini, ada media lain yang orang sering menyebutnya “media sosial” atau media maya atau media digital. Ada pula yang menyebutnya sebagai media massa baru. Sebenarnya, internet dan media digital lainnya adalah lukus baru kehidupan. Seperti lokus tradisional atau lokus real, pada dunia maya juga terjadi berbagai bentuk konteks komunikasi. Ada komunikasi interpersonal (seperti email, *skype* perorangan dll.), ada komunikasi kelompok (*BBM*, *facebook*, *pokrol*, dll.), ada komunikasi organisasi (pusat memimpin rapat seluruh cabang perusahaan), dan ada komunikasi massa (misal *kompas.com*). Sama seperti di dunia *real* juga, apabila komunikator mengerahkan seluruh saluran, di dunia maya tersebut, kepada sasaran yang banyak dan beragam maka hal itu dinamakan komunikasi sosial. Hanya saja, bentuk-bentuk konteks komunikasi di dunia maya harus “diembeli” dunia maya atau jejaring (*www*), menjadi “komunikasi interpersonal dunia maya” atau “komunikasi jejaring interpersonal” sampai “komunikasi sosial dunia maya” atau “komunikasi jejaring sosial”.

Dalam hal kampanye, tentu menggunakan komunikasi konteks tertinggi pada urutan yang disebutkan, yakni “komunikasi sosial” dan “komunikasi jejaring sosial”. Dalam komunikasi sosial, lebih terkontrol! Pemfitnah pun berhati-hati untuk melemparkan fitnahannya (meskipun kalau sudah kalap, orang sudah tidak pikir etika lagi). Dalam komunikasi jejaring sosial orang lebih bebas bicara apa pun, termasuk memfitnah lawan politik. Pesan SMS berantai, akan sulit ditelusuri siapa pembuatnya! Itulah yang digunakan mereka. Sulit juga terbandung! Ibarat pisau media pun, terutama media maya, tergantung yang menggunakan. Media lokus maya akan lebih

sukar mengendalikannya. Dalam tingkat dunia, katakanlah, tidak ada kerja sama untuk membuat hukum *cybercrime*. Dalam tingkat nasional, memang sudah ada UU Transaksi Elektronik (katakanlah tidak bersipat cair dan multitafsir) namun dalam dunia politik jangankan menuntut yang maya, yang real saja agak susah, karena banyak kasus dan memakan banyak waktu, sementara keputusan harus cepat diambil.

Nah, kalau demikian halnya, apakah sikap partai yang berdiri di belakang tokoh-tokoh baru sudah tepat, dengan membiarkan fitnah itu menggelinding semakin besar dan makin banyak ragamnya? Secara jangka panjang, memang sejarah akan membuktikan. Yang benar pasti jadi pemenang! Tapi secara jangka pendek –dan dunia politik praktis adalah jangka pendek!– akan sangat merugikan yang benar! Namun, memang, sekali partai terpitnah mengurus hal-hal seperti itu maka kemungkinan akan terjebak dalam “perang fitnah” yang tidak produktif untuk bangsa dan negara! Kalau demikian halnya, bagaimana seharusnya?

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan diskusi dimaksud, dapatlah disimpulkan pokok pikiran dalam artikel ini –dalam rangka memberi dasar perencanaan dan pengembangan komunikasi politik demokratis khas Indonesia–sebagai berikut: (1) Karakter dominan budaya komunikasi politik Indonesia adalah feodal, didominasi oleh kaum priayi sebagai komunikatorsehingga orientasi ke atas tak dapat dihindari. Dominasi ini mengakibatkan budaya komunikasi politik *egalitarian* yang bersemi di masyarakat menjadi “pudar”, tidak berkembang. Di sisi lain karakter masyarakat prismatic juga masih terlihat, terutama pasca gerakan reformasi: ingin egalit tapi kebablasan, ingin lepas dari sipat feodal, secara organisatoris dan kenegaraan masih saja terlihat!; (2) Ada dua lintasan “globalisasi” (baca: globalisme) yang membuat budaya politik *egalitarian* bukan hanya pudar, tapi masa sekarang malah “punah”. Dua lintasan “globalisasi” tersebut adalah: a) **Lintasanfeodal-otokrasi** yang dilakukan Eropa (Belanda) dengan penjajahannya, sehingga menyebabkan terpeliharanya feodalisme kaum priyayi. b) **Lintasan liberal-kapitalisme** yang dibawa oleh Amerika Serikat dengan hegemoni budaya dan perdagangannya, yang kini dilakukan secara massif melalui media massa ditambah dengan munculnya **dunia maya**, menyebabkan budaya politik Indonesia kini “*acak adut*”; (3) Elit politik yang memang berkepentingan dengan “rente” kekuasaan sengaja memelihara dan memupuk hal ini. Sementara masyarakat semakin tak berdaya menghadapi keadaan ini baik dari segi konsepsi, maupun dari segi perlawanan praktis. Di sisi lain, priyayi tempo dulu, kini malah mulai terlibat sikap dalam–bahkan menjadi pelopor–pengembangan budaya *egalitarian* tersebut. Sebagai contoh, Sri Sultan Hamengkubuwono, karakternya jauh lebih egalit dibanding SBY yang presiden itu. Yang bisa menjadi harapan sasaran pengembangan “Demokrasi Pancasila” atau Demokrasi Gotong Royong Ilahiyah-humanistik“ adalah kaum menengah yang pola sikap dan perilakunya lebih egalit dan lebih mudah menerima perbaikan, seraya dengan meminta sokongan kaum priayi yang rendah hati dan egalit seperti Sri Sultan tersebut.; (4) Model komunikasi politik asli Indonesia adalah “Model Komunikasi Politik Gotong Royong Ilahiyah-humanistik” atau “Model Komunikasi Politik Pancasila”, yang pada masa orde baru direduksi, bahkan dijadikan tirai untuk mengelabui. Di dunia, model ini dikenal dengan “*Monistic-Emancipatory*”. Hanya saja, model mendunia ini belum terumus dalam sebuah pokok-pokok nilai dasar seperti Pancasila di Indonesia.; (5)

Dalam pengembangan budaya politik demokratis lokal ini, perlu diadakan upaya dari dua sisi: 1) Perlu dikembangkan definisi dan konsepsi-konsepsi demokratis tentang komunikasi politik. Dari sudut ilmu, Komunikasi Politik harus didasarkan pada paradigma *antipositivistik*, minimal *apositivistik*. 2) Dari sudut sosialisasi, perlu dibuat perencanaan yang matang dan terpadu dengan sekala nasional agar komunikasi politik demokratis ini bisa diterima masyarakat, minimal kaum/kelas menengah.; dan (6) Perlu didiskusikan: Bagaimana mengintegrasikan tokoh baru yang memberi harapan dalam pengembangan komunikasi politik demokrasi khas Indonesia–namun banyak diserang dengan *negatif campagne*–dengan efektivitas dunia maya sebagai lokus *komunikasi jejaring sosial* untuk memperkuat *komunikasi sosial* (dunia nyata) yang mejanjikan harapan mewujudkannya–namun juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok penyerang.

Ucapan Terima kasih : Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak, khususnya Bpk. Hasyim Ali Imran yang telah banyak membantu memberikan masukan teknis bagi penyelesaian karya tulis ilmiah ini. Semoga amal ibadah tersebut mendapat balasan setimpal dari Allah SWT, Amin.

Daftar Pustaka

- Budiardjop, Miriam; 2010, Dasar-dasar Ilmu Politik; Gramedia, Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2009, *Komunikasi Politik*; Jakarta: Rajawali Pers,
- Jayaweera, Nevilee; Sarath Amunugama. 1987, *Rethinking Development Communication*; Singapore : amic,.
- Mawlana, hamid, Wilson, Lauri J. 1990. *The Passing of Modernity*. New York – London : Longman,
- Nimmo, Dan.1999. *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan, dan Media*.Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Geertz, Clifford. 1960. *Santri, Abangan, dan Priyayi*; Jakarta.
- Hoogevelt, Ankie M. 1985. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*. Jakarta :Rajawali Press.
- Klapper, Joseph T. 1960. *The Effects of Mass Communication*. Ontario Canada – AS: The Free Press Cooperation. .
- Kluckhon, Clyde. 1981. dalam Koentjaraningrat; *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta :Gramedia, 1989.
- Koentjaraningrat. 1989. *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Little John, Stephen W1983. *Theories of Human Communication*. California :Wads-Warth Publising Company.
- Middleton, John, Syed A Rahim. 1977. *Perspective in Communication Policy and Planing*; East-West Center.
- Middleton, John. 1980. *Approaches to Communication Planning*. UNESCO.
- Severin, Werner, J W Tankard. 1979. *Communication Theories: Origins, Methods, Uses*; New York : Hasting Hause Publisher.
- Soekanto, Sarjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press..
- Sumarno, A.P.1989. *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Tjokroamodjojo, Bintoro.1979. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.